

PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT OLEH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Wike Anggraini^{*}, Rossy Lambelanova², Nurasih Ritonga³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, 45363, Indonesia;
e-mail: wikeanggraini@ipdn.ac.id

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, 45363, Indonesia;
e-mail: rossylambelanova@ipdn.ac.id

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, 45363, Indonesia;
email: nurasiahringtona@gmail.com

* Correspondence

Received: 06-06-2022; Accepted: 30-11-2021 ; Published: 30-11-2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan petani kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mayoritas masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani kelapa sawit. Namun, produksi kelapa sawit di daerah tersebut masih relatif rendah. Untuk dapat meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit masyarakat, pemerintah membuat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yaitu pemberdayaan petani kelapa sawit melalui program tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Lambelanova yang terdiri dari perencanaan pemberdayaan, pendampingan intensif, pembauran, pelibatan masyarakat terdampak, pengawasan serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih kurang optimal. Hal tersebut karena dari enam tahapan pemberdayaan, hanya ada dua tahapan yang berjalan dengan baik. Tingkat pengetahuan petani yang masih rendah, ketidakstabilan harga jual kelapa sawit, sarana dan prasarana yang tidak cukup serta ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus kelompok tani menjadi beberapa hambatan dalam proses pemberdayaan ini.

Kata Kunci: Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit, Peran Pemerintah, Peremajaan Sawit Rakyat

Abstract: This study aims to analyze the empowerment of oil palm farmers by the Department of Agriculture and Animal Husbandry in South Labuhanbatu District, where the majority of people having livelihoods as oil palm farmers. However, palm oil production in the area is still relatively low. To be able to increase the production of community oil palm plantations, the government created the People's Oil Palm Rejuvenation (PSR) program. This research is a qualitative research with a case study design of empowering oil palm farmers through the program. The data were collected through interviews and documentation. This research uses Lambelanova's empowerment stages which consist of empowerment planning, intensive assistance, assimilation, involvement of affected communities, monitoring and evaluation. The results of the study show that the empowerment of oil palm farmers in South Labuhanbatu District is still not optimal. From the six stages of empowerment, only two stages went well. The low level of farmer knowledge, the unstable selling price of palm oil, inadequate facilities and infrastructure and members' distrust of farmer group administrators are some of the obstacles in this empowerment process.

Keywords: Palm Oil Farmer Empowerment, Role of Government, Oil Palm Rejuvenation

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara agraris dengan sumber daya alam yang berlimpah (Salasa, 2021). Kekayaan yang berlimpah tersebut menjadikan pertanian sebagai sektor utama pencaharian penduduk Indonesia yang menguntungkan. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kaya akan keragaman hayatinya. Hal tersebut menjadi berkah tersendiri bagi negara dan masyarakat. Ada berbagai keragaman hayati yang terdapat di Bumi Nusantara seperti jenis komoditi pertaniann, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, perikanan hingga peternakan. Dengan potensi yang begitu besar maka dibutuhkan pengaturan dan pengelolaan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki Indonesia.

Salah satu potensi terbesar yang dimiliki Indonesia yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan salah satu kunci pendapatan negara. Dengan kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia membuat banyak varietas tumbuhan yang ada di Indonesia. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis sumber alam yang dapat diperdagangkan, tetapi komoditas pangan yang menjadi penyumbang terbesarnya (Rahmanta, 2020). Selain itu, Sumatera Utara juga memiliki komoditas perkebunan salah satunya yaitu kelapa sawit. Saat ini Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia (Wulansari, 2017). Dengan demikian potensi tersebut pastinya dapat menjadi sektor perekonomian yang strategis bagi Indonesia jika dimanfaatkan dengan kebijakan yang benar.

Sumatera Utara adalah wilayah dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah Riau (Salqaura, 2020). Berdasarkan data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 luas Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara mencapai 1.256.808 ha, yaitu seluas 505.882,84 ha (40%) dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta, 321.663,85 ha (26%) dikelola perusahaan perkebunan negara dan seluas 429.261,31 ha (34%) merupakan perkebunan sawit milik masyarakat. Produksi minyak sawit yang dihasilkan yaitu, sebanyak 1.456.710,07ton berasal dari perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, dan sebanyak 2.965.333,85ton dari perkebunan kelapa sawit swasta dan negara.

Berdasarkan data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, daerah yang memiliki tumbuh kembang yang baik bagi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat dan Simalungun. Sedangkan daerah yang memiliki potensial untuk

pengembangan kelapa sawit terdapat pada Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Mandailing Natal dan Deli Serdang (Disbun, 2020).

Di daerah Labuhanbatu Selatan sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 terdapat lahan kelapa sawit seluas 42.839 hektare, dengan sebaran luas berdasarkan kecamatan yakni di Kecamatan Kampung Rakyat seluas 11.217 hektare kebun kelapa sawit, di Kecamatan Kotapinang seluas 9.985 hektare kebun kelapa sawit, di Kecamatan Sungai Kanan seluas 9.916 hektare kebun kelapa sawit, di Kecamatan Torgamba seluas 8.630 hektare kebun kelapa sawit, dan di Kecamatan Silangkitang seluas 3.182 hektare kebun kelapa sawit.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020, Kecamatan Kampung Rakyat merupakan daerah yang memiliki kebun kelapa sawit terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu dengan luas 11.217 hektare. Dengan luasnya perkebunan tersebut maka diperlukan adanya perencanaan dan pengolahan yang baik agar pembangunan berkelanjutan terwujud, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki Kecamatan Kampung Rakyat juga memacu pada pertumbuhan, serta melakukan kegiatan pembangunan demi meningkatkan mutu serta taraf kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat (Disbun, 2020).

Secara menyeluruh perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan (swasta) lebih besar dibandingkan dengan jumlah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat (Ngadi & Noveria, 2017). Kurangnya penyuluhan mengenai usaha perkebunan kelapa sawit mengakibatkan produktivitas kelapa sawit milik masyarakat lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit milik perusahaan (swasta), hal ini dapat dilihat dari rendahnya harga kelapa sawit masyarakat karena kualitas kelapa sawit milik masyarakat tidak terlalu tinggi (Dharmawan, 2019). Berdasarkan hasil wawancara via telepon saat peneliti melakukan pra penelitian pada 30 agustus 2021 dengan bapak Amri Ritonga selaku salah satu petani sawit di Kecamatan Kampung Rakyat mengatakan bahwa harga kelapa sawit milik masyarakat bernilai Rp. 1.700 sedangkan yang dimiliki oleh perusahaan (swasta) yaitu Rp. 2.318. Perbedaan harga kelapa sawit ini disebabkan bibit yang dimiliki oleh masyarakat petani kelapa sawit kualitasnya lebih rendah dibanding kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan, kualitas bibit petani kelapa sawit yang rendah ini disebabkan sulitnya mendapatkan bibit unggul dan penyaluran bibit berkualitas dari dinas terkait kurang disosialisasikan, sehingga masyarakat kesulitan dalam mencari bibit unggul untuk perkebunan kelapa sawit mereka.

Permasalahan harga kelapa sawit sampai saat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena harga sawit yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga sawit yang ada di lapangan, hal ini dikarenakan regulasi terkait penetapan harga kelapa sawit dari pemerintah belum optimal dan belum sepenuhnya dilaksanakan para pengelola kelapa sawit (Hutabarat, 2017). Bapak Amri Ritonga selaku petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat juga mengatakan bahwa pada saat musim panen tiba hasil perkebunan sawit akan sangat berlimpah, tetapi ironisnya harganya mengalami penurunan. Hal tersebut dikatakan oleh bapak Amri Ritonga ketika peneliti melakukan wawancara pra penelitian (2021).

Selain kebijakan perlindungan petani, upaya pemberdayaan memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik, pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani (Satria, 2015). Di dalamnya pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam suatu program pemberdayaan selain perencanaan, pendampingan intensif, pembauran, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan yang juga merupakan faktor yang juga penting (Lambelanova, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dan untuk memberikan gambaran tentang peran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit untuk menyejahterakan masyarakat, maka peneliti memfokuskan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya Kecamatan Kampung Rakyat yang hampir mayoritas penduduknya menjadi petani kelapa sawit.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus mengenai pemberdayaan petani sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurut Cresswell (2007), fokus dari penelitian kualitatif dengan desain studi kasus adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan dengan memilih beberapa individu yang dapat menjelaskan mengenai fokus penelitian yang diangkat. Adapun individu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, Camat Kampung Rakyat, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan, serta Petani Kelapa Sawi yang peneliti yakin memiliki pengetahuan untuk menjelaskan program pemberdayaan ini. Sumber data

sekunder bagi peneliti adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka, Kecamatan Kampung Rakyat dalam angka, serta data-data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis yang berdasarkan data yang didapatkan dari individu yang telah ditentukan di lapangan kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan teori yang peneliti gunakan.

III. Hasil dan Pembahasan

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam BAB V pasal 40 menyatakan bahwa, “Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi”. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan pada fokus masalah, peneliti menggunakan teori Lambelanova, di dalam teori tersebut menyebutkan tahapan pemberdayaan yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lambelanova, 2019), antara lain dimensi perencanaan, pendampingan intensif, pembauran, pelibatan masyarakat terdampak, pengawasan dan evaluasi.

Dimensi Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Petani Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (2022), perencanaan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini bertujuan untuk memberikan pengarahan yang baik kepada petani kelapa sawit serta membuat rencana kegiatan untuk peningkatan kemampuan petani kelapa sawit. Pada proses perencanaan ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan melakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas sawit petani.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu petani kelapa sawit memperbaharui perkebunan kelapa sawit yang sudah tidak produktif diganti dengan kelapa sawit yang berkualitas, yang dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga produktivitas kelapa sawit dan yang terpenting adalah untuk keberlangsungan pendapatan pekebun kelapa sawit dimasa depan. Program PSR ini tidak hanya sebatas mengganti tanaman tua menjadi tanaman baru, selain itu produktivitas tanaman kelapa sawit masyarakat juga lebih berdaya saing dan memberikan keuntungan. Disamping itu, manfaat lainnya yaitu pengaturan tata ruang perkebunan kelapa sawit menjadi lebih teratur (BPDP, 2020).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menyebutkan bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini baru diimplementasikan pada tanggal 26 Juli 2018, dan masih berjalan sampai dengan sekarang. Program PSR yang dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan hasil panen perkebunan kelapa sawit petani sehingga mampu berproduksi dan dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit. Lebih jelasnya peneliti telah melakukan wawancara dengan ibu Asni, SP, M.Si, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan program PSR yang menjelaskan bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini merupakan program nasional dan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program ini pertama kali launching hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Bapak Bupati Labuhanbatu Selatan di Desa Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat. Program PSR ini dikelola secara lintas kementerian, lintas instansi, lintas sektor, dan lintas wilayah yang dalam pelaksanaannya berada dibawah teknis koordinasi Kementerian Pertanian Melalui Ditjen Perkebunan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Jannes Maringan Siahaan, ST selaku Kepala Bidang Pengembang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa dengan adanya program PSR ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen perkebunan kelapa sawit milik masyarakat sehingga juga dapat meningkatkan pendapatan petani itu sendiri. Pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para petani mengenai program PSR ini. Selanjutnya melakukan survei lahan yang layak untuk dilakukan program PSR.

Bukan hanya dengan pihak pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani yaitu bapak Deni yang mengatakan bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada petani

kelapa sawit yaitu dengan program Peremajaan Sawit rakyat (PSR). Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan ada sosialisasi secara langsung terkait informasi dari program yang akan dilaksanakan kepada para petani kelapa sawit. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menyurvei terlebih dahulu lahan yang layak untuk dilakukan peremajaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui pada tahap perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah melakukan sosialisasi terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sosialisasi yang dilakukan yaitu oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan langsung kepada masing-masing kelompok tani. Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menyurvei lahan yang layak untuk diremajakan serta mengarahkan para petani untuk memilih bibit unggul yang mempunyai kualitas dan standar yang baik agar menghasilkan tumbuh kembang yang baik dan berkualitas. Berikut data *replanting* kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat:

Tabel 1. Data *replanting* atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kampung Rakyat

No	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Air Merah	-
2.	Perkebunan Batang Sepongol	79
3.	Perkebunan Tolan	-
4.	Perkebunan Tolan I/II	120
5.	Perlabian	157
6.	Tanjung Medan	-
7.	Tanjung Mulia	134
8.	Tanjung Selamat	98
9.	Teluk Panji I	-
10.	Teluk Panji II	-
11.	Teluk Panji III	145
12.	Teluk Panji IV	230
Total		963

Sumber: Profil Perkebunan Kecamatan Kampung Rakyat, 2021

Dari data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah di *replanting* (deremajakan) masih sangat sedikit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat yaitu seluas 11.217 ha, sedangkan yang

sudah diremajakan masih seluas 963 ha atau sekitar 8% dari jumlah keseluruhan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan *replanting*.

Berikut gambar perkebunan kelapa sawit petani yang sudah melakukan *replanting*.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Gambar 1. Perkebunan Kelapa Sawit Petani yang Sudah Melakukan *Replanting*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (2022) mengatakan bahwa program *replanting* ini berguna untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang sudah menurun. Program ini diharapkan dapat membantu para petani agar hasil panen mereka meningkat. Pelaksanaan program peremajaan sawit atau *replanting* ini memiliki permasalahan, yaitu masih banyak petani yang tidak ingin melakukan *replanting* dikarenakan kurangnya rasa percaya petani akan keberhasilan dari program tersebut. Permasalahan ini tentu menghambat pelaksanaan program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR). Berikut gambar perkebunan kelapa sawit petani yang belum melakukan replanting.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Gambar 2. Perkebunan Kelapa Sawit Petani yang Belum Melakukan *Replanting*

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa kelapa sawit yang sudah tua yaitu memiliki umur lebih dari 25 tahun akan mengalami penurunan kuantitas serta kualitas. Hal tersebut dikarenakan semakin tua umur sawit tersebut maka semakin menurun buah yang akan dihasilkan, dan lambat laun tidak akan menghasilkan buah lagi. Oleh sebab itu dibutuhkan peremajaan agar sawit mengalami tumbuh kembang kembali sehingga dapat menambah hasil panen petani.

Perkembangan dari program Peremajaan Sawit Rakyat ini masih baru dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga progressnya masih belum signifikan dilaksanakan serta masih banyak para petani yang tidak mau sawitnya dilakukan *replanting*, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan petani yang kebunnya ingin di remajakan. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu para petani meningkatkan produktivitas kelapa sawitnya.

Dimensi Pendampingan Intensif

Pendampingan intensif sangat perlu dilakukan untuk menghindari kesenjangan pemahaman di antara pihak yang menerima informasi dengan pihak yang memberi informasi. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan sosial, budaya dan ekonomi. Seorang pendamping dituntut untuk bisa memosisikan dirinya sebagai pembimbing, perencana, motivator, pemberi informasi, penghubung, fasilitator serta sebagai evaluator. Bapak Khoirul Efendi Batubara, SH, MH selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa dalam menyukseskan kegiatan PSR ini pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada petani kelapa sawit dan yang menyampaikan informasi juga tentunya adalah orang yang mengerti dan memahami program yang akan dilakukan yaitu dari pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Jannes Maringan Siahaan, ST selaku Kepala Bidang Pengembang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyebutkan bahwa Program PSR dilakukan tentu saja demi meningkatkan hasil perkebunan dari petani kelapa sawit. Program peremajaan ini dilakukan bagi sawit yang umurnya telah melebihi 25 tahun. Selain itu, ada bantuan hibah sebesar Rp.50 juta per kapling (1 kapling = 2 ha) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perkebunan kepada BDPKKS. Sedangkan, menurut bapak Sukri

yang juga merupakan salah satu petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sendiri sudah melakukan sosialisasi terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ada bantuan hibah juga sebanyak Rp. 50 juta per kapling. Tapi petani merasa bantuan segitu masih kurang, mengingat banyak biaya yang harus dikeluarkan, dari pembelian bibit sawit, perawatan, pemupukan sampai dengan menghasilkan buah yang dapat dijual.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pada dimensi pendampingan masyarakat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah melakukan sosialisasi terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada petani kelapa sawit. Terdapat bantuan dana hibah juga sebesar Rp. 50 juta per kapling (1 kapling = 2 ha). Pada dasarnya dana sebesar itu masih sangat kurang bagi para petani, hal tersebut karena petani masih harus membeli bibit, pupuk serta melakukan perawatan lainnya.

Hal ini juga menjadi salah satu faktor petani tidak mau melakukan peremajaan pada sawit mereka. Selain karena mereka harus menambah dana lagi mereka juga menjadi tidak memiliki penghasilan lagi jika sawit mereka diremajakan, setidaknya sampai sawit mereka menghasilkan buah kembali (kurang lebih 4-5 tahun). Sehingga para petani masih mempertahankan perkebunan sawit mereka demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dimensi Pembauran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pembauran yaitu proses, cara, pembuatan, serta pencampuran. Dalam hal ini pembauran yang dimaksud pada dimensi ini yaitu bagaimana adaptasi program pemberdayaan petani kelapa sawit serta organisasi apa saja yang terlibat dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam melakukan tugasnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibantu oleh organisasi yang terkait akan pemberdayaan petani kelapa sawit.

Tidak semua program yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan program di lapangan, sehingga dibutuhkan penyesuaian atau adaptasi program. Bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

mengatakan banyak kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini, dan dari pemerintah sendiri masih belum ada upaya tindak lanjut yang dilakukan, sementara masih tetap melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah saat ini sedang menyiapkan upaya agar kendala-kendala yang dihadapi kedepannya dapat di atasi.

Berdasarkan wawancara di atas dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terdapat kendala, yaitu ketidakmauan petani untuk melakukan program tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya petani akan keberhasilan program serta tidak adanya sumber pendapatan lain jika sawit mereka dilakukan *replanting*. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum ada upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Pada saat ini Dinas Perkebunan dan Peternakan sedang menyiapkan upaya agar kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi kedepannya.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari ibu Asni, SP, M.Si, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan, pihak pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi dengan para masyarakat petani. Pemerintah juga menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan petani. Dalam hal pemberdayaan kepada para petani dibantu oleh dinas-dinas terkait. Salah satunya yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal pupuk yang bagus serta mengadakan subsidi kepada para petani. Karena salah satu permasalahan menurunnya hasil panen petani yaitu karena mahalnnya harga pupuk, sehingga para petani tidak mampu membeli pupuk untuk sawit mereka.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memberdayakan petani kelapa sawit dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu dalam hal pemilihan pupuk yang baik serta untuk mengadakan subsidi pupuk bagi para petani kelapa sawit. Hal ini didukung dengan data kebutuhan pupuk petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat.

Tabel 2. Kebutuhan Pupuk Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Kampung Rakyat

Tahun	Jumlah (Ton)
2017	5.658
2018	6.478
2019	7.025
2020	7.960
2021	8.580

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2021

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pupuk petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat dari tahun 2017-2021 jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari banyaknya kebutuhan pupuk para petani harus didukung dengan ketersediaan pupuk yang melimpah karena pupuk sebagai hal penting yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas kelapa sawit yang dihasilkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pupuk petani kelapa sawit.

Dimensi Pelibatan Masyarakat

Perkebunan kelapa sawit yang biasanya berada di berbagai daerah pelosok desa, seringkali menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraannya. Kemampuan ekonomi masyarakat desa dapat terwujud melalui kegiatan berusaha yang dapat dilakukan masyarakat desa itu sendiri. Sebab itu, petani kelapa sawit sebagai aktor atau pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk ambil bagian dalam pemberdayaan perkebunan kelapa sawit. Bapak Jannes Maringan Siahaan, ST, selaku Kepala Bidang Pengembang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa potensi lokal yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk meningkatkan potensi lokal tersebut dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan potensi lokal tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengadakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas sawit petani.

Potensi lokal terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu perkebunan kelapa sawit. Salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan potensi lokal yaitu dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam pelaksanaan program tersebut belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan petani terhadap keberhasilan program. Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Joko, salah satu petani kelapa sawit yang ada di Kecamatan Kampung Rakyat mengatakan bahwa telah ada program dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan hasil produksi sawit yaitu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tapi mereka masih belum percaya karena belum melihat hasilnya secara langsung. Dan hasil sawit yang mereka hasilkan saat ini dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa kepercayaan masyarakat akan keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih kurang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya hasil langsung yang dilihat oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat. Hal yang dibutuhkan dari para petani adalah bukti nyata dari orang yang berhasil menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Setelah melihat keberhasilan program tersebut baru akan menumbuhkan tingkat kepercayaan petani sehingga akan mendorong partisipasi petani dalam melaksanakan program tersebut

Dimensi Pengawasan

Pengawasan memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu pencapaian tujuan. Pengawasan dalam suatu kegiatan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dengan adanya pengawasan penyelewengan akan penggunaan kekuasaan, kedudukan, serta keuangan tidak akan terjadi. Pelaksanaan pengawasan yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap terlaksananya suatu kegiatan. Tanpa adanya proses pengawasan akan menimbulkan kehancuran bagi suatu kegiatan. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung atau dipantau dari jarak jauh. Bapak Wahdi, S.IP, selaku Camat Kampung Rakyat mengatakan, dalam pengawasan dia tidak mengontrol secara langsung masalah anggaran serta proses penanaman sampai dengan menghasilkan buah kembali, karena hal tersebut kaitannya langsung kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tugasnya hanya ikut mengawasi jika ada sosialisasi atau pemberian bantuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Camat tidak berperan langsung dalam hal pengawasan terhadap masalah anggaran serta proses penanaman sampai dengan menghasilkan buah kembali. Camat hanya berperan dalam pengawasan terhadap sosialisasi atau pemberian bantuan kepada para petani kelapa sawit. Menurut bapak Tono, selaku petani kelapa sawit yang telah melakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pihak dinas memang memberikan dana bantuan sebesar Rp. 50 juta, selebihnya petani yang menambah kekurangannya. Setelah itu pihak dinas tidak melakukan pengawasan lanjutan terhadap sawit yang ditanam, mereka hanya memberikan bantuan di awal saja, selebihnya adalah tanggung jawab petani sendiri.

Pada dimensi pengawasan masih belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut karena tidak adanya pengawasan lagi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap sawit rakyat yang telah diremajakan. Pihak dinas hanya memberikan dana bantuan di awal saja, setelah itu para petani harus merawat sendiri sawitnya tanpa ada pengawasan lagi dari pihak dinas. Sehingga pihak dinas tidak mengetahui bagaimana tumbuh kembang dari sawit yang telah diremajakan tersebut, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau ada kendala seperti bibit rusak dan lain sebagainya. Para petani kelapa sawit juga tidak bisa menyampaikan kendala yang mereka rasakan selama sawit mereka diremajakan hingga menghasilkan buah Kembali.

Dimensi Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta pemberdayaan tentang kegiatan yang diadakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan guna mengoreksi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kegiatan berlangsung serta melakukan koreksian pada hasil dari kegiatan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran petani kelapa sawit dan juga untuk meninjau perkembangan terhadap sawit yang telah di remajakan.

Pada proses evaluasi ini dapat diketahui juga berjalan atau tidaknya program yang diberikan, yaitu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jika program yang dilakukan masih kurang, maka dibutuhkan evaluasi lagi bagi pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar program dapat berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan

Ibu Asni, SP, M.Si, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan:

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih ada beberapa para petani yang acuh tak acuh. Hal tersebut dilihat dari respon petani terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), masih banyak para petani yang tidak mau dilakukan *replanting* terhadap lahan sawitnya. Alasan dari mereka karna sawit mereka masih menghasilkan dan kurangnya rasa percaya mereka terhadap berhasilnya program tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Asni bahwa masih banyak para petani yang belum mengerti pentingnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi peningkatan produktivitas sawit mereka. Para petani menolak melakukan *replanting* karena menurut mereka sawit yang ada masih menghasilkan buah yang banyak, serta penolakan mereka juga dilandasi dengan kurangnya rasa percaya mereka terhadap berhasilnya program tersebut. Jika melakukan *replanting* mereka juga tidak tahu darimana lagi sumber pencaharian mereka. Sedangkan menurut Bapak Sutris yang juga merupakan salah satu petani kelapa sawit, dia telah melakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kampung Rakyat mengatakan bahwa dia melakukan *replanting* pada tahun 2019, dan sekarang tanaman sawitnya sudah mulai tumbuh besar. Dari awal penebangan hingga sekarang dia tidak mendapatkan bantuan apapun dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahkan pihak dinas juga tidak pernah memantau keadaan sawit milik Bapak Sutris yang telah diremajakan. Pihak dinas hanya memberikan bantuan modal di awal saja, selebihnya mereka tidak melakukan apapun. Bantuan modal yang diberikan juga dirasakan petani sawit masih sangat kurang karena digunakan dari mulai perawatan sampai dengan menghasilkan buah.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya memberikan bantuan berupa modal di awal, selebihnya tidak ada. Hal tersebut karena tidak adanya pengawasan dari pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah dilakukannya peremajaan bagi sawit petani. Sehingga para petani kesulitan dalam menyampaikan kendala mereka selama proses penebangan hingga menghasilkan buah kembali.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan secara bertahap. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan hasil secara maksimal. Apabila proses Peremajaan

Sawit Rakyat (PSR) dilakukan secara bertahap dan menyebutkan bahwa program ini akan mengurangi waktu menunggu masa panen kelapa sawit. Proses dilakukan bertahap sehingga masih ada sawit yang akan diproduksi oleh pabrik.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat antara lain:

Tingkat Pengetahuan Petani Sawit Masih Rendah

Pada permasalahan ini para petani yang merupakan pelaku utama usaha perkebunan masih banyak yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai. Ibu Asni, SP, M.Si yang merupakan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan: “Permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan pada umumnya para petani tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus, baik dari sekolah mereka dulu maupun dari penyuluhan-penyuluhan yang diperoleh setelah mereka menjadi petani kelapa sawit.”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan bapak Jannes Maringan Siahaan, ST selaku Kepala Bidang Pengembang Usaha Perkebunan mengemukakan bahwa banyak petani yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, tetapi ada juga petani yang bersifat acuh, sehingga dibutuhkan kesadaran tinggi para petani secara mandiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang diberikan oleh Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan. Sehingga petani tersebut bisa mandiri mengelola lahan pertaniannya dan kehidupannya bisa sejahtera. Dari wawancara tersebut menggambarkan bahwa masih banyak petani yang mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimiliki secara alami maupun sudah turun temurun didapatkan dari orangtua yang dulunya berprofesi sebagai petani kelapa sawit juga.

Ketidakstabilan Harga Jual Kelapa Sawit

Permasalahan harga kelapa sawit yang tidak stabil sering sekali terjadi. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kualitas kelapa sawit yang kurang segar, bahkan kurang terurus oleh pemiliknya sehingga menghasilkan kualitas kelapa sawit yang rendah karena tidak memakai bibit yang unggul. Patokan harga sawit juga tidak ada diberikan

oleh pabrik pengolahan kelapa sawit kepada *toke* (penadah kelapa sawit) juga menyebabkan harga jual kelapa sawit tidak stabil. Harga jualnya yang sering turun ataupun ada petani yang membiarkan buah kelapa sawit tersebut membusuk karna harga jualnya turun. Bapak Bambang Suroso, SH, selaku Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan:

Kualitas kelapa sawit yang baik menjadi patokan harga sawit yang akan dijual ke pabrik. Pihak pabrik tidak akan memberi harga yang tinggi jika kualitas sawit tidak baik. Sehingga para penadah (*toke*) juga memberi harga sesuai dengan kualitas sawit yang dimiliki petani. Sawit berkualitas baik dihasilkan dari bibit unggul serta perawatan yang cukup terhadap kelapa sawit. Bukan hanya dengan pihak pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani bapak Joko mengatakan, apabila petani ingin menjual hasil produksinya langsung ke pabrik, terhambat dengan tidak adanya sarana transportasi dan jarak yang jauh antara pabrik pengolahan kelapa sawit dengan perkebunan mereka, jadi mau tidak mau mereka terpaksa harus menjual hasil produksinya kepada *toke* ataupun penadah. Jika tidak ada transportasi untuk mengangkut hasil produksi kelapa sawit ataupun *toke* tidak mau masuk dikarenakan jalan yang rusak, biasanya petani membiarkan buah kelapa sawit tersebut membusuk di pinggir jalan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa, pada umumnya hasil produksi kelapa sawit dijual kepada *toke* atau penadah kelapa sawit. Ketetapan harga jual terkadang tidak stabil dari *toke* atau penadah tersebut, terkadang harga ditentukan dari kualitas kelapa sawit yang diproduksi oleh petani kelapa sawit, ini membuat para petani tidak menjual hasil panennya. Hal inilah yang menyebabkan hasil produksi kelapa sawit tidak stabil. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga melakukan pemantauan harga kelapa sawit para petani perbulan dengan melakukan survei langsung ke kelompok- kelompok tani, tetapi dalam permasalahan harga Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ikut menentukan harga kelapa sawit.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menjadi faktor penghambat yaitu jalan yang terdapat pada perkebunan serta transportasi yang kurang dalam pengangkutan hasil produksi kelapa sawit milik petani. Hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani Bapak

Amri mengatakan: “Jika jalanan yang ada saat ini sudah pernah di ajukan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan akan di tindak lanjuti, namun ternyata hal tersebut belum berjalan hingga saat ini.”

Hal ini juga senada dengan pernyataan dari ibu Asni (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang menyatakan: “Kelompok tani memang sudah mengajukan perihal perbaikan jalan, tetapi karena banyak jalan perkebunan petani yang juga harus diperbaiki sehingga harus dilakukan secara bertahap dan bergantian.” Pernyataan di atas juga bisa menjadi penghambat petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Kondisi jalan yang kurang memadai petani untuk beraktivitas di sekitar perkebunan. Belum lagi jika sedang banjir, para petani harus mengangkut sawit ke tepi jalan dengan menggunakan perahu. Sarana usaha tani yang masih kurang adalah pupuk dan pestisida, serta informasi tentang pembudidayaan kelapa sawit sesuai baku teknis dan modal usaha yang cukup besar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil panen kelapa sawit tersebut, karena jika petani kelapa sawit memperoleh pupuk dari pedagang ataupun pengecer pupuk harga yang diberikan relatif mahal.

Ketidakpercayaan Anggota Kelompok Tani Terhadap Pengurus Kelompok

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus kelompok tani, adanya *distrust* dari anggota organisasi terhadap pengurus merupakan salah satu faktor yang menyebabkan, pemerintah daerah khususnya Bidang Pengembang Usaha Perkebunan lamban dalam melakukan pemberdayaan kepada para petani. Hal ini karena organisasi ini berguna sebagai penyalur informasi dari dinas kepada para petani, dan sebagai sarana untuk memudahkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada petani.

Selain itu rendahnya rasa kepercayaan para kelompok tani kepada para pengurus kelompok tani, merupakan bukti bahwa dalam organisasi kelompok tani tersebut masih memiliki kendala internal yang harus diselesaikan. Seperti yang diketahui bahwa dalam sebuah organisasi itu sendiri memiliki struktur kepengurusan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Ketua sebagai orang kepercayaan yang dituakan oleh kelompok tersebut, jika anggota kelompok sudah tidak memiliki kepercayaan kepada ketua, hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Amri (ketua kelompok tani di Desa Teluk Panji I) yang mengatakan: “Kendala yang dihadapi kelompok tani antara lain administrasi kelompok tani yang kurang lengkap dan kurang percaya kepada pengurus kelompok. Ini dikarenakan kelompok tani belum benar-benar memahami fungsi kelompok tani itu sendiri dan apa timbal balik yang akan diberikan kepada para anggota kelompok tani tersebut”. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari bapak Deni mengatakan bahwa: “Saya masih kurang mengerti untuk apa ada kelompok tani dan apa tujuan dibuatnya kelompok tani. Karena menurut saya tidak ada kelompok tani juga saya bisa mengurus perkebunan kelapa sawit yang saya miliki.” Peneliti menyimpulkan bahwa para kelompok tani masih kurang kepercayaan kepada pengurus kelompok. Di sini perlu adanya bimbingan dari Bidang Pengembang Usaha Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar para petani dapat saling bekerja sama dan tingkat kepercayaan antar anggota dan pengurus dapat ditingkatkan. Sehingga tujuan dari kelompok tani dapat tercapai.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pemberdayaan kepada petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat. Namun dalam melakukan pemberdayaan tersebut masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

1. Perencanaan Pemberdayaan

Pada tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik. Program yang dilakukan untuk memberdayakan petani kelapa sawit yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Namun program tersebut belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya persentase jumlah lahan yang sudah *direplanting*, yaitu sekitar 8%. Para petani masih banyak yang tidak ingin melakukan program *replanting* tersebut.

2. Pendampingan Intensif

Tahap pendampingan sudah berjalan dengan baik. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sosialisasi serta memberikan dana bantuan sebesar Rp. 50 juta per kapling (1 kapling = 2 ha). Namun pihak petani masih harus menambah kekurangan dana selama proses penebangan hingga menghasilkan buah kembali.

3. Pembauran

Pada tahap pembauran masih kurang optimal. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan program di lapangan, maka dibutuhkan penyesuaian atau adaptasi program. Salah satu permasalahannya yaitu mahalnnya harga pupuk, sehingga pihak dinas harus mengupayakan menambah jumlah pupuk subsidi bagi para petani.

4. Pelibatan Masyarakat Terdampak

Potensi lokal yang dimiliki Kecamatan Kampung Rakyat yaitu perkebunan kelapa sawit, maka perkebunan kelapa sawit menjadi aktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat. Namun pada tahap ini juga masih kurang optimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan para petani kelapa sawit akan keberhasilan program PSR tersebut.

5. Pengawasan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya memberi bantuan dana diawal saja, selebihnya diserahkan kepada petani. Tidak ada pengawasan lagi selama proses *replanting* dari pihak dinas, mulai dari penebangan hingga menghasilkan buah kembali.

6. Evaluasi

Pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 tahapan pemberdayaan hanya 2 tahapan saja yang berhasil, yaitu tahapan perencanaan pemberdayaan dan pendampingan intensif. Sedangkan pada tahapan pembauran, pelibatan masyarakat terdampak, pengawasan serta evaluasi masih butuh perhatian khusus dari pihak terkait agar tercapainya tujuan pemberdayaan.

Adapun hambatan dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat yaitu rendahnya pengetahuan serta sumber daya manusia, tidak stabilnya harga jual kelapa sawit, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya organisasi kelompok tani dan rasa kepercayaan kelompok tani masih rendah.

V. Daftar Pustaka

- BPDP. (2020, Aug 18). Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Diambil kembali dari <https://www.bpdp.or.id/program-peremajaan-perkebunan-kelapa-sawit>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The counseling psychologist*, 35(2), 236-264.

- Dharmawan, A. d. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304-315.
- Disbun. (2020). Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun. Diambil kembali dari <http://disbun.sumutprov.go.id/statistik/>
- Hutabarat, S. (2017). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1). doi:<https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.713>
- Lambelanova, R. (2019). Community Empowerment Of The Former Red-Light District Of Dolly In Surabaya, East Java Province. *WEI International Academic Conference Proceedings*. <https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/WEI-HUM-2019-Boston-Proceedings.pdf>
- Ngadi, & Noveria. (2017). Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1). doi:<https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.716>
- Rahmanta. (2020). Pengaruh Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agrica*, 13(2). doi:<https://doi.org/10.31289/agrica.v13i2.4063>
- Salasa, A. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1). doi:[doi:doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357](https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357)
- Salqaura, S. S. (2020). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Dengan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Agristan*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2343>
- Satria, P. Y. (2015). Peran Penyuluhan Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. *Jom Faperta*, 2(1).
- Wulansari, I. (2017). Industrialisasi Minyak Sawit Di Indonesia: Resistensi Warga Dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah Terhadap Industri Sawit. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 9-16.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).